

Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pendidikan, dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Peningkatan Pendapatan Perkapita Di Indonesia 2011-2020

Septiadi Supriatna*

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

* septiadisupriatna@gmail.com,

Abstract. Middle Income Trap (MIT) is a phenomenon that describes an economic slowdown in a country. The economic slowdown was marked by stagnation in per capita income (PDRB per capita) within a certain period of time. Indonesia is included in the category of low-middle-income countries that have the potential to enter the Middle Income Trap. There are many factors that affect a country stuck in the Middle Income Trap, and this study was written to analyze how much influence the Poverty Level, Education Level, and Provincial Minimum Wage have on Per Capita GRDP in Indonesia. This type of research is quantitative descriptive, using panel data from thirty-four provincial sectors in Indonesia in 2011-2020. The method used is regression with panel data. The estimated model used is the Random Effect Model (REM) by looking at the effects of each sector. The results of the study show that partially the poverty level has a negative effect on per capita GRDP, education level has a positive effect on per capita GRDP, and the Provincial Minimum Wage (UMP) has a positive effect on per capita GRDP.

Keywords: *Middle Income Trap, GRDP Per Capita, Poverty Level, Level Education, Provincial Minimum Wage.*

Abstrak. Middle Income Trap (MIT) adalah sebuah fenomena yang menggambarkan perlambatan ekonomi di suatu negara. Perlambatan ekonomi tersebut ditandai dengan adanya stagnasi pendapatan per kapita (PDRB per kapita) dalam jangka waktu tertentu. Indonesia termasuk ke dalam golongan negara berpendapatan menengah rendah yang berpotensi masuk ke dalam Middle Income Trap. Ada banyak faktor yang mempengaruhi sebuah negara terjebak ke dalam Middle Income Trap, dan penelitian ini ditulis untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pendidikan, dan Upah Minimum Provinsi terhadap PDRB Perkapita di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan data panel tiga puluh empat sektor Provinsi di Indonesia pada tahun 2011-2020. Metode yang digunakan adalah regresi dengan panel data. Estimasi model yang digunakan adalah Random Effect Model (REM) dengan melihat efek dari tiap sektor. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap PDRB Perkapita, Tingkat Pendidikan berpengaruh positif terhadap PDRB Perkapita, dan Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh positif terhadap PDRB Perkapita.

Kata Kunci: *Middle Income Trap, PDRB Perkapita, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Provinsi.*

A. Pendahuluan

PDB per kapita seringkali digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi bisa diartikan sebagai suatu proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Hal ini berarti bahwa dalam segi ekonomi, kesejahteraan tercermin dalam peningkatan output per kapita yang sekaligus memberikan banyak alternatif pada masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat (Dewi *et al.*, 2021). Tidak semua negara memiliki pendapatan per kapita yang tinggi dan merata, bahkan ketika pendapatan perkapita tinggi, kesenjangan dalam masyarakat masih menjadi sebuah masalah. Bank dunia telah mengategorikan negara ke dalam empat kategori berdasarkan pendapatan perkapita, yaitu low income (kurang dari \$1.035) lower middle income (\$1.036 - \$4.045) upper middle income (\$4.046- \$12.535) dan terakhir high income (lebih dari \$12.535) (Asmirawati, 2017).

Berdasarkan data bank dunia, pada tahun 2020, Indonesia memiliki produk domestik bruto (PDB) per kapita senilai \$3.869,59 per kapita, setara dengan Rp 54,58 juta per kapita. Berdasarkan data tersebut dapat kita simpulkan bahwa Indonesia termasuk kedalam kategori negara lower middle income. Middle Income Trap merupakan isu relevan bagi Indonesia yang sekarang termasuk ke dalam lower middle income terkait dengan salah satu tujuan pembangunan ekonomi yaitu meningkatkan pendapatan per kapita penduduknya agar tercapai kesejahteraan rakyat (Pramasela & Subagio, 2022).

Banyak negara kesulitan untuk keluar dari fenomena ini, pada tahun 2007 Gill dan Kharas menyebutkan bahwa perlambatan pertumbuhan dan terjebaknya suatu negara kedalam status negara berpenghasilan menengah dengan istilah Middle Income Trap. Belajar dari Korea Selatan, ketika memasuki negara berpendapatan menengah, Korea Selatan mempersiapkan SDM serta riset dan pengembangan industri berbasis teknologi untuk jangka panjang. Mereka berhasil mengubah struktur industri nya dengan fokus pada produk berteknologi maju yang memiliki daya saing tinggi, hingga akhirnya mereka tidak membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi (Wira & Dharma, 2017).

Banyak negara kesulitan untuk keluar dari fenomena ini, pada tahun 2007 Gill dan Kharas menyebutkan bahwa perlambatan pertumbuhan dan terjebaknya suatu negara kedalam status negara berpenghasilan menengah dengan istilah Middle Income Trap. Belajar dari Korea Selatan, ketika memasuki negara berpendapatan menengah, Korea Selatan mempersiapkan SDM serta riset dan pengembangan industri berbasis teknologi untuk jangka panjang. Mereka berhasil mengubah struktur industri nya dengan fokus pada produk berteknologi maju yang memiliki daya saing tinggi, hingga akhirnya mereka tidak membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi (Wira & Dharma, 2017)

Pembangunan di negara berkembang umumnya menghadapi berbagai kesulitan, mulai dari masalah kemiskinan dan pengangguran hingga ke sektor lain tak terkecuali pada masalah ketenagakerjaan. Keadaan di negara berkembang dalam beberapa dasawarsa ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak sanggup menciptakan kesempatan kerja yang lebih cepat dari pertambahan penduduk. Indikator lain yang akan di tinjau adalah tingkat upah karena merupakan hasil akhir yang diharapkan selalu seimbang antara pengusaha dan karyawan. Untuk mencapai keseimbangan itu pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh untuk menciptakan SDM yang unggul, sehingga siap untuk menggunakan struktur industri yang lebih canggih agar dapat meningkatkan daya saing dan pendapatan (Yuni, 2020).

SDM adalah faktor fundamental dalam pertumbuhan ekonomi, SDM yang rendah merupakan turunan dari tingkat kemiskinan, kemiskinan memiliki dampak pada penurunan kualitas hidup, menghambat terciptanya sumberdaya manusia unggul, menciptakan beban sosial ekonomi, meningkatkan kriminalitas dan menurunkan ketertiban umum. Secara umum tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan akan tetapi diiringi dengan perlambatan. Berangkat dari teori yang dikemukakan oleh Nurkse (1961) tentang fenomena lingkaran setan kemiskinan yang menjerat masyarakat miskin di negara-negara miskin. Lemahnya tingkat pendapatan riil menyebabkan rendahnya kemampuan menabung dan lemahnya kapasitas modal untuk investasi yang berdampak pada rendahnya produktifitas dan akhirnya menyebabkan lemahnya tingkat pendapatan. Proses melingkar itu menyebabkan masyarakat miskin sulit keluar dari

kemiskinannya jika tidak ada intervensi dari luar (Nurjihadi & Dharmawan, 2016).

Pembangunan ekonomi selalu dipengaruhi oleh seberapa besar kontribusi pendidikan sebagaimana yang dinyatakan dalam teori human capital. Kontribusi tersebut dapat dicapai melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas kerja. Ketika SDM telah siap untuk perubahan progresif dalam proses produksi sederhana menuju industri dan jasa berteknologi tinggi maka akan mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Teori human capital menganggap pertumbuhan penduduk ditentukan oleh produktivitas perorangan. Jika setiap orang memiliki pendapatan yang lebih tinggi karena pendidikannya lebih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi penduduk dapat ditunjang. Rendah atau tingginya pendidikan akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduk, semakin rendah pendidikan maka tingkat produktivitas penduduk juga akan rendah, hal itu berdampak pada rendahnya pendapatan, begitu pula sebaliknya semakin tinggi pendidikan maka akan semakin tinggi tingkat produktivitas penduduk yang kemudian mendorong tingkat pendapatan menjadi semakin tinggi (Arifin, 2019).

Melalui kebijakan pengupahan, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menetapkan upah minimum yang sesuai dengan standar kehidupan yang layak. Adanya kebijakan upah minimum juga ditetapkan atas dasar pada kebutuhan fisik minimum, selanjutnya didasarkan pada Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Kelayakan suatu standar upah minimum harus didasarkan pada kebutuhan para pekerja. Teori upah efisiensi, yang menyatakan bahwa membayar upah yang tinggi mungkin akan menguntungkan perusahaan karena bisa menaikkan efisiensi para pekerja. Tenaga kerja harus produktif agar hasil produksi bisa mengimbangi kenaikan upah, kenaikan upah akan meningkatkan daya beli juga efektivitas pekerja sehingga juga meningkatkan output barang dan jasa (Lube et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang diatas, serta melihat fenomena yang terjadi saat ini dimana Indonesia sedang berada di status negara berpendapatan menengah. Maka penelitian ini akan fokus terhadap pengaruh antara tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan, dan Upah minimum Provinsi karena merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan per kapita. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis kondisi tersebut dengan judul “Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pendidikan, dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Peningkatan Pendapatan Perkapita di Indonesia 2011-2020. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan, dan Upah Minimum Provinsi terhadap peningkatan pendapatan perkapita di Indonesia 2011-2020.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan, dan Upah Minimum Provinsi terhadap peningkatan pendapatan perkapita di Indonesia 2011-2020.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana penelitian kuantitatif menggunakan angka sebagai data dan dianalisis menggunakan data statistik. Penulis menggunakan metode ini untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen dalam fenomena yang ada. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data yang didapat melalui media perantara berupa literatur, teks akademis, majalah, surat kabar dan lain sebagainya. Selain itu data sekunder dapat dicari melalui catatan dokumen perusahaan, publikasi pemerintah serta analisis industri yang dipaparkan melalui media, situs web dsb. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Produk Domestik Bruto Per Kapita atas dasar harga berlaku di Indonesia (Ribu Rupiah) Tahun 2011-2020 yang diambil dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.
2. Data Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2011-2020 (Persen) yang diambil dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.
3. Data Rata-rata Lama Sekolah di Indonesia Tahun 2011-2020 (Tahun) yang diambil dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.
4. Data Tingkat Upah Minimum Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2020 (Ribu Rupiah) yang diambil dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hubungan Antara Tingkat Kemiskinan (X1), Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Provinsi dengan Peningkatan Pendapatan Perkapita (Y)

Berikut adalah penelitian mengenai hubungan antara iklan Le Minerale dengan kesadaran merek, yang diuji menggunakan teknik analisis korelasi Rank Spearman. Hasil pengujian dijelaskan pada tabel 1.

Tabel 1. Hubungan Antara Tingkat Kemiskinan (X1), Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Provinsi dengan Peningkatan Pendapatan Perkapita (Y)

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	1.704795	4.598007	0.0000
X1	-0.122414	-2.065907	0.0396
X2	1.261775	5.316901	0.0000
X3	0.457716	15.22911	0.0000

Adjusted R-Squared	0.887756
F-statistic	894.7397
Prob (F-statistic)	0.000000
Durbin Watson-Stat	0.460608

Sumber: Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2015.

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan matematis sebagai berikut:

tabel di atas, diperoleh persamaan matematis sebagai berikut:

$$y = 1.704795 - 0.122414x_1 + 1.261775x_2 + 0.457716x_3$$

Dimana:

Y = PDRB per kapita

X1 = Tingkat kemiskinan

X2 = Tingkat pendidikan

X3 = Upah Minimum Provinsi

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa:

$\beta_0 = 1.704795$, berarti bahwa ketika x_1 , x_2 , dan x_3 bernilai 0, maka y akan bernilai 1.704795

$\beta_1 = -0.122414$, berarti bahwa ketika x_1 naik satu satuan dan variabel bebas lainnya konstan, maka y berkurang sebesar 0.122414

$\beta_2 = 1.261775$, berarti bahwa ketika x_2 naik satu satuan dan variabel bebas lainnya konstan, maka y akan bertambah sebesar 1.261775

$\beta_3 = 0.457716$, berarti bahwa ketika x_3 naik satu satuan dan variabel bebas lainnya konstan, maka y akan bertambah sebesar 0.457716

Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap peningkatan pendapatan perkapita

Berdasarkan hasil analisis di atas variabel tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap PDRB Perkapita di Indonesia pada tingkat alpha 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95%. Nilai koefisien dari variabel ini -0.122414 artinya jika terjadi kenaikan tingkat kemiskinan sebanyak 1 persen maka akan menurunkan tingkat PDRB Perkapita sebesar 122.414 ribu rupiah. Begitupun sebaliknya, jika terjadi penurunan tingkat kemiskinan sebanyak 1 persen maka akan meningkatkan tingkat PDRB Perkapita sebesar 122.414 ribu rupiah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang sebelumnya pernah diteliti oleh (Arif Novriansyah, 2018; Prayitno & Yustie, 2020; Syahri & Gustiara, 2020). Dari hasil penelusuran literatur ini, kenaikan jumlah kemiskinan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini pendapatan perkapita. Pada penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa salah satu

penyebab ketimpangan pendapatan adalah banyaknya jumlah penduduk miskin dan pembangunan ekonomi yang tidak merata. Selain itu terdapat kesulitan yang sama bagi penduduk negara berkembang yang terutama disebabkan karena tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penyerapan tenaga kerja yang rendah, menyebabkan produktivitasnya rendah sehingga pendapatan rendah, hal ini mengakibatkan rendahnya standar kualitas hidup atau rendahnya tingkat hidup (Prayitno & Yustie, 2020).

Tingkat hidup yang rendah ditandai dengan kesehatan yang buruk dan tidak memadai, dan pendidikan dan layanan masyarakat yang rendah. Hal tersebut berakibat pada (1) penghargaan diri yang rendah dan (2) kebebasan yang terbatas. Ada hubungan antara kemiskinan dengan keterbelakangan dengan beberapa aspek ekonomi dan aspek non ekonomi. Tiga komponen utama sebagai penyebab kemiskinan masyarakat yaitu (1) rendahnya taraf hidup, (2) rendahnya rasa percaya diri, dan (3) terbatasnya kebebasan. Ketiga sebab tersebut memiliki hubungan timbal balik. Pilar utama kajian kemiskinan paling tidak didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan budaya, ekonomi dan sosial. Perspektif budaya penduduk miskin yang hidup miskin adalah lebih mudah hidup tanpa pendapatan daripada harus bekerja keras memperoleh pendapatan (Syahri & Gustiara, 2020). Proses pendewasaan dan peningkatan kecerdasan masyarakat dapat menciptakan manusia yang tangguh, berwawasan luas, memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dapat menumbuhkan sikap pengembangan pada diri maupun masyarakat. Sehingga pada akhirnya kualitas penduduk yang mumpuni akan menciptakan pekerjaan yang akan mengantarkan mereka pada pendapatan yang tinggi (Arif Novriansyah, 2018).

Pengaruh tingkat pendidikan terhadap peningkatan pendapatan perkapita

Berdasarkan hasil uji t (uji parsial) variabel Tingkat Pendidikan berpengaruh positif terhadap PDRB Perkapita di Indonesia pada tingkat alpha 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95%. Nilai koefisien dari variabel ini 1.261775 artinya jika terjadi kenaikan tingkat pendidikan selama 1 tahun maka akan meningkatkan tingkat PDRB Perkapita sebesar 1.261.775 ribu rupiah. Begitupun sebaliknya, jika terjadi penurunan tingkat pendidikan selama 1 tahun maka akan menurunkan tingkat PDRB Perkapita sebesar 1.261.775 ribu rupiah.

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh (Asmirawati, 2017) dan (Lucya & Anis, 2019). Dari penelitian sebelumnya tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap peningkatan ekonomi atau dalam hal ini Pendapatan Perkapita. Hal itu terjadi karena peningkatan tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas SDM, ketika kualitas SDM sudah mumpuni maka tingkat upah yang ideal untuk mereka dapatkan pun akan meningkat. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa peningkatan dalam segi pendidikan dapat meningkatkan perekonomian pada masa mendatang.

Peningkatan rata-rata lama sekolah di Indonesia akan semakin meningkatkan kualitas SDM untuk mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas. Hal tersebut sesuai dengan Teori pertumbuhan Harod-Domar yang merupakan salah satu teori pertumbuhan ekonomi modern, teori ini menekankan arti pentingnya pembentukan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Teori ini menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah adanya pertumbuhan modal fisik, pertumbuhan modal manusia, dan kemajuan teknologi. Dalam hal modal manusia, pertumbuhan ekonomi disamping dipengaruhi oleh kuantitas sumberdaya manusia juga dipengaruhi oleh kualitasnya. Kualitas sumber daya manusia ini ditentukan oleh tingkat kesehatan dan pendidikannya. Makin tinggi tingkat kesehatan dan pendidikan sumber daya manusia suatu bangsa maka makin baik kualitas sumberdaya tersebut, dan akan semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita yang dapat dicapai oleh bangsa tersebut (Arifin, 2019).

Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap PDRB Per Kapita

Berdasarkan hasil uji t (uji parsial) variabel Tingkat Kemiskinan berpengaruh positif terhadap PDB Perkapita di Indonesia pada tingkat alpha 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95%. Nilai koefisien dari variabel ini 0.457716 artinya jika terjadi kenaikan tingkat UMP sebesar 1 rupiah, maka akan meningkatkan tingkat PDRB Perkapita sebesar 457.716 ribu rupiah. Begitupun sebaliknya, jika terjadi penurunan tingkat UMP sebesar 1 rupiah maka akan menurunkan tingkat

PDRB Perkapita sebesar 457.716 ribu rupiah.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh (Aprilya et al., 2022); (Gunawan & Arka, 2021); (Hasbi et al., 2019). Dari hasil penelusuran literatur ini, UMP berpengaruh signifikan positif terhadap PDRB Perkapita baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penelitian yang lain juga menyebutkan bahwa tingkat UMP memiliki hubungan signifikan positif terhadap Pendapatan Perkapita. Dimana ketika UMP mengalami penurunan maka akan berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. UMP adalah besaran upah yang diterima oleh pekerja, jadi UMP yang rendah tersebut berdampak terhadap semakin banyaknya kesempatan kerja yang dibuka oleh perusahaan atau pelaku usaha untuk memaksimalkan produksinya, hal tersebut dikarenakan kesempatan bagi pelaku usaha untuk dapat membayar upah pekerja yang tidak terlalu tinggi, sehingga hal tersebut dapat menstimulus pergerakan ekonomi karena akan semakin besar perputaran uang dimasyarakat dan tingginya minat beli masyarakat karena harga produk dapat menjadi lebih terjangkau, sehingga dapat terus mendorong produksi suatu usaha dan mendorong konsumsi.

Dengan meningkatnya upah maka akan semakin meningkatkan kualitas tenaga kerja. Hal tersebut sesuai dengan teori upah efisiensi, menurut teori ini upah yang dibayarkan terlalu tinggi akan menguntungkan perusahaan karena bisa menaikkan efektivitas dan efisiensi tenaga kerja perusahaan. Hal ini terjadi karena kesehatan para pekerja akan lebih terjamin sebagai akibat dari besarnya upah yang mereka terima. Para pekerja yang sehat akan lebih produktif dari pekerja yang kurang sehat atau bahkan yang tidak masuk karena sakit. Hal ini membuat teori ini relevan terhadap negara berkembang karena sebagian besar pekerja negara berkembang kekurangan nutrisi sehingga kesehatan mereka kurang terjamin. Selain itu peningkatan upah minimum akan mempengaruhi daya beli masyarakat yang nantinya akan meningkatkan sektor produksi sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang mendapatkan kerja, ketika itu terjadi tingkat pendapatan perkapita akan meningkat (Arham, 2018).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Provinsi di Indonesia pada tahun 2011-2020, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bebas (Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pendidikan, dan Upah Minimum Provinsi) berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu PDRB Perkapita yakni sebesar 88.78% yang dapat dijelaskan dalam persamaan model. Sedangkan sisanya 11.22% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam persamaan model.
2. Koefisien Tingkat Kemiskinan sebesar -0.122414. artinya setiap adanya peningkatan kemiskinan sebanyak 1 persen maka akan menurunkan PDB Perkapita sebesar 122.414 rupiah.
3. Koefisien Tingkat Pendidikan yaitu sebesar 1.261775. Artinya setiap adanya peningkatan pendidikan selama 1 tahun maka akan meningkatkan PDB Perkapita sebesar 1.261.775 rupiah.
4. Koefisien Upah Minimum Provinsi sebesar 0.457716. Artinya jika terjadi peningkatan UMR sebesar 1 juta rupiah maka akan meningkatkan PDRB Perkapita sebesar 457.716 rupiah.

Acknowledge

Peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak Universitas Islam Bandung yang telah mendukung dan membantu dalam menyelesaikan tulisan ini, serta tak lupa terimakasih untuk Ade Yunita Mafruhah, S.E. M.Soc., Sc. Yang telah membimbing serta memberikan arahan dengan penuh kesabaran agar tulisan ini dapat terselesaikan

Daftar Pustaka

- [1] Aprilya, I., Juliprijanto, W., & Tidar, U. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk , Umr , Dan Tpt Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Transekonomika*, 2(5), 469–482.
- [2] Arham, M. A. (2020). Faktor-Faktor Pendorong Produktivitas Tenaga Kerja Dan Tantangannya Di Indonesia. In *Fakultas Ekonomi UNG*.
- [3] Arif Novriansyah, M. (2018). Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo. *Gorontalo Development Review*, 1(1), 59. <https://doi.org/10.32662/golder.v1i1.115>
- [4] Arifin. (2019). Pengaruh Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau. *Turats: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 7(2), 145–160. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/turast/article/view/1300>
- [5] Asmirawati. (2017). Analisis Middle Income Trap Di Indonesia. *Jurnal Ecosains*, 6(1), 1–14.
- [6] Dewi, R. K., Sari, D., & Wahyuningsih, D. (2021). Analisis Makro Ekonomi Sebagai Langkah Indonesia Keluar Dari Middle Income Trap. *Inspire Journal*, 1(1), 110. <https://ejournal.uksw.edu/inspire>
- [7] Gunawan, I. W., & Arka, S. (2021). Pengaruh Umr Dan Pendidikan Terhadap Kesempatan Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(5), 459. <https://doi.org/10.24843/eeb.2021.v10.i05.p03>
- [8] Hasbi, A. R., Dahri, A., & Salju, S. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Pendapatan Perkapita Di Kabupaten Luwu Timur. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 8(1), 45–63. <https://doi.org/10.35906/je001.v8i1.332>
- [9] Lube, F., Kalangi, J. B., & Tolosang, K. D. (2021). Analisis Pengaruh Upah Minimum Dan Pdrb Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(03), 25–36.
- [10] Lucya, C., & Anis, A. (2019). Pengaruh Teknologi Dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 1(2), 509. <https://doi.org/10.24036/jkep.v1i2.6261>
- [11] Nurjihadi, M., & Dharmawan, A. H. (2016). Lingkaran Setan Kemiskinan Dalam Masyarakat Pedesaan, Studi Kasus Petani Tembakau di Kawasan Pedesaan Pulau Lombok. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4(2), 120–127. <https://doi.org/https://doi.org/10.22500/sodality.v4i2.13372>
- [12] Pramasela, T., & Subagio, S. (2022). Middle-income Trap: Upaya Pembangunan Manusia dan Peran Pemerintah. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 13(1), 63–80. <https://doi.org/10.23960/administratio.v13i1.297>
- [13] Prayitno, B., & Yustie, R. (2020). Pengaruh Tenaga Kerja, IPM, dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota Di Jawa Timur Tahun 2014-2018. *Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 16(April), 47–53.
- [14] Syahri, D., & Gustiara, Y. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara Periode 2015-2019. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1(1), 34–43. <https://journal.fkpt.org/index.php/jtear/article/view/59>
- [15] Wira, K., & Dharma, S. (2017). Faktor Penyebab Sulitnya Malaysia Lepas Dari Status Middle-Income Country. In *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* (Vol. 6, Nomor 1).
- [16] Yuni, R. (2020). Pengaruh Umr , Kurs Dan Penduduk Jiwa Terhadap Tingkat Pengangguran Sumatera Utara Periode 2001-2017. *Niagawan*, 9(1), 73. <https://doi.org/10.24114/niaga.v9i1.17658>

- [17] Yuanda, Diva Abigail, Haryatiningsih, Ria (2022). *Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran, dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bandung 2005-2020*. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis* 2(2). 115-124.